

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Serapan Anggaran DKI Jakarta di Bawah Target

Tersisa satu pekan, total penggunaan PABD 2019 baru 77,03 persen.

Francisco Rosarians

francisco@tempo.co.id

JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta gagal menembus target penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2019. Total serapan anggaran seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di bawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan baru mencapai 77,03 persen atau Rp 59,98 triliun dari total anggaran belanja Rp 77,85 triliun.

“Pasti tak akan capai target. Tinggal beberapa hari. Kami juga sudah tak bisa dibantu apa-apa,” kata Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta, Gembong Warsono, kemarin.

Menurut Gembong, rendahnya penyerapan anggaran selalu berkaitan dengan kebijakan dan gaya kepemimpinan gubernur. Diambil kebiasaan Anies yang mudah mencopot pejabat menjadi salah satu penyebab rendahnya penyerapan anggaran itu. Sebab, gaya Anies tersebut

membuat pimpinan SKPD berhati-hati, sehingga lamban dalam mengambil keputusan.

Selain itu, Gembong menilai perencanaan keuangan yang diajukan pemerintah provinsi kerap tidak efektif. Fakta itu merujuk pada persoalan anggaran-anggaran janggal yang selalu muncul dalam pembahasan APBD di Ibu Kota. “DPRD hanya bisa mendorong agar APBD 2020 lebih baik. Juga meminta jangan terlalu sering copot-ganti kepala SKPD,” kata Gembong.

Fraksi PDIP memang berulang kali mengkritik rendahnya penyerapan anggaran di era Anies Baswedan. Tahun lalu, fraksi ini menuding keberadaan sejumlah pejabat pelaksana tugas di SKPD yang membuat serapan APBD hanya 70 persen hingga 10 hari sebelum tutup tahun. Meski tembus hingga 81,96 persen, Fraksi PDIP mendesak Anies segera melantik pejabat definitif di setiap SKPD.

Wakil Ketua DPRD, Zita Anjani, menilai rendahnya serapan anggaran juga berkaitan dengan pelak-



Gembong Warsono.

sanaan pemilihan umum dan pemilihan legislatif 2019. Kegiatan itu kerap membuat pembahasan dan persetujuan sejumlah proyek serta program daerah terhambat karena keperluan kampanye kepala daerah atau anggota legislatif inkumben. “Mudah-mudahan agenda ekonomi bisa bertumbuh baik karena tak ada lagi tahun politik,” kata dia.

Adapun Anies membantah tuduhan tentang penyebab rendahnya penyerapan anggaran itu.

Menurut dia, penyerapan anggaran yang rendah ini akibat penerapan kebijakan defisit anggaran pada pertengahan 2019.

Pemerintah DKI memang sempat mengeluarkan keputusan untuk menunda sejumlah proyek strategis saat penerimaan pajak di Ibu Kota masih Rp 33,5 triliun, November lalu. Total defisit semakin besar karena pemerintah pusat juga belum menyetorkan dana bagi hasil sejumlah Rp 6,39 triliun. “Kami sempat *nahan*. Harapannya, serapan nantinya aman sesuai dengan jumlah penerimaan yang kami miliki,” kata dia.

Pemerintah DKI Jakarta telah mencantumkan target penyerapan anggaran sebesar 85 persen dari APBD 2019 yang sebesar Rp 86,89 triliun. Menurut dia, pemerintah DKI masih optimistis mencapai serapan anggaran tahun ini di atas 80 persen. “Nanti lihat saja angkanya (sebelum ganti ke tahun 2020). Mungkin enggak sampai 85 persen, tapi bisa 83-84 persen,” ujar Anies.

● IMAM HAMDI

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Serapan Anggaran DKI Jakarta di Bawah Target

Label Merah dan Kuning

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta memberikan catatan merah atau kuning untuk satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang tingkat penyerapan anggarannya rendah. Label merah diberikan kepada SKPD dengan realisasi keuangan di bawah 65 persen dan kuning untuk SKPD yang realisasi keuangannya 66-75 persen.

Label Kuning

- ▶ **Dinas Kehutanan:** 69,8 persen
Rp 3,3 triliun -> Rp 2,35 triliun
- ▶ **Dinas Pemuda dan Olahraga:** 73,6 persen
Rp 1,71 triliun -> Rp 1,26 triliun
- ▶ **Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu:** 71,8 persen
Rp 392,1 miliar -> Rp 289,7 miliar
- ▶ **Dinas Pariwisata dan Kebudayaan:** 75,09 persen
Rp 1,06 triliun -> Rp 796,4 miliar
- ▶ **Dinas Perhubungan:** 70,2 persen
Rp 1,63 triliun -> 1,15 triliun
- ▶ **Dinas Perindustrian dan Energi:** 70,3 persen
Rp 1,19 triliun -> Rp 838,4 miliar

Label Merah

- ▶ **Dinas Bina Marga:** 52,06 persen
Rp 3,76 triliun -> Rp 1,96 triliun
- ▶ **Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan:** 51,5 persen
Rp 666,7 miliar -> Rp 343,8 miliar
- ▶ **Dinas Lingkungan Hidup:** 62,8 persen
Rp 3,61 triliun -> Rp 2,27 triliun
- ▶ **Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kota:** 41,7 persen
Rp 1,82 triliun -> Rp 759,2 miliar
- ▶ **Dinas Sumber Daya Air:** 46,04 persen
Rp 3,87 triliun -> Rp 1,78 triliun
- ▶ **Badan Pajak dan Retribusi Daerah:** 61,5 persen
Rp 1,15 triliun -> Rp 711,7 miliar
- ▶ **Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik:** 64,09 persen
Rp 492,3 miliar -> Rp 315,5 miliar

Serapan Anggaran

APBD 2012

Target:
Rp 41,4 triliun
Realisasi:
80 persen

APBD 2014

Target:
Rp 72,9 triliun
Realisasi:
59 persen

APBD 2016

Target:
Rp 62,9 triliun
Realisasi:
82 persen

APBD 2018

Target:
Rp 41,4 triliun
Realisasi:
81,96 persen

APBD 2013

Target:
Rp 50,1 triliun
Realisasi:
82 persen

APBD 2015

Target:
Rp 65,7 triliun
Realisasi:
68 persen

APBD 2017

Target:
Rp 71,9 triliun
Realisasi:
83 persen

APBD 2019 per 22 Desember 2019

Target:
Rp 77,85 triliun
Realisasi:
77,03 persen

• SUMBER: BAPPEDA DKI JAKARTA